



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP / LAKIP)
TAHUN 2022**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Majapahit No. 09 Mataram Telp. 631585, Fax. (0370) 622502 (Pusat)

M A T A R A M KODE POS : 83125 (Pusat) 83236 (Depo)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun sesuai dengan format dan petunjuk yang ada dan merupakan hasil rekam Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu Tahun Anggaran dari Bulan Januari sampai Bulan Desember 2022.

Harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat memberikan informasi, evaluasi dan umpan balik bagi semua penentu kebijakan dan para pengambil keputusan untuk menentukan langkah kebijakan yang lebih akseleratif dan dilaksanakan secara serius dan konsisten bagi percepatan Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan agar dapat mengawal visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju NTB Gemilang.

Kami ucapkan terima kasih kepada para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah bekerja dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga. Semoga apa yang telah kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat.

Mataram, Januari 2023
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

MAHDI, SH., MH.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650423 199103 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Sumber Daya Aparatur	6
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	7
1.5 Landasan Hukum	9
1.6 Sistematika Penyusunan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja	11
2.2 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	19
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	20
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	24
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	25
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan	26
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	27
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	31
3.2 Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.3.1	Data Sumber Daya Aparatur	6
Tabel 1.3.2	Data Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan	6
Tabel 1.3.3	Aset yang dikelola Desember 2022	7
Tabel 2.1.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2019-2023	13
Tabel 2.1.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Berdasarkan Renstra 2019-2023 ...	14
Tabel 2.1.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022	15
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022	17
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.1.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	20
Tabel 3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021	21
Tabel 3.1.3	Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Berdasarkan Renstra 2019-2023	24
Tabel 3.1.5	Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2022	26
Tabel 3.1.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	28
Tabel 3.1.6.1	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan dan Sub Kegiatan	29
Tabel 3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2022	32
Tabel 3.2.1	Realisasi Anggaran Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022	33
Tabel 3.2.2	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022	34

Daftar Gambar

Gambar 1.2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB (Pergub NTB Nomor 53 Tahun 2021, Tanggal 31 Desember 2021)	5
Gambar 3.2.1 Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022 Perpustakaan Nasional R.I. Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022	6

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 telah menetapkan Rencana Kerja yang dituangkan dalam program/kegiatan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang akan dicapai secara bertahap selama 5 tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu Informasi yang disajikan bukan hanya isi keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga memuat kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022, dengan 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB di bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan menghadapi berbagai permasalahan yang dituangkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB 2019-2023.

Analisis lingkungan eksternal menjadi perhatian untuk mengidentifikasi permasalahan serta isu strategis guna menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Berikut tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Semakin berkembangnya informasi digital di internet;
- b. Kebutuhan masyarakat akan informasi digital semakin meningkat;
- c. Jangkauan layanan perpustakaan dan kearsipan yang masih belum maksimal untuk daerah terpencil; dan
- d. Kesadaran masyarakat akan arsip yang masih kurang.

Berikut beberapa peluang lingkungan internal dalam pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, sebagai berikut:

- a. Tersedianya aplikasi koleksi digital bagi pemustaka;
- b. Kemudahan masyarakat dalam mengakses koleksi digital melalui pelayanan keliling;
- c. Adanya pembinaan pengelolaan arsip melalui layanan keliling arsip; dan
- d. Regulasi terkait perpustakaan dan arsip.

Dalam upaya menata dan mengembangkan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan dalam waktu 5 tahun kedepan, berdasarkan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, sebagai berikut:

- a. Isu strategis Bidang Kearsipan:
 - 1) Belum optimalnya sistem administrasi kearsipan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas;
 - 2) Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; dan
 - 3) Belum terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip.
- b. Isu strategis Bidang Perpustakaan:
 - 1) Masih kurangnya Sarana Prasarana pendukung peningkatan minat dan daya baca masyarakat, terutama mobil Perpustakaan Keliling untuk menjangkau wilayah wilayah pelosok di Provinsi NTB;
 - 2) Masih kurangnya Koleksi bahan bacaan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada;
 - 3) Belum terwujudnya jumlah dan kapasitas perpustakaan yang memadai, terutama perpustakaan Desa, dimana berdasarkan data dari Kemendes & PDT, dari 1005 Desa/Kelurahan yang ada di NTB, baru 668 Desa yang memiliki Perpustakaan Desa; dan
 - 4) Masih minimnya dukungan untuk Pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi serta juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah. Terdapat 2 tujuan berdasarkan bidang urusan wajib non pelayanan dasar pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah adalah “Terwujudnya peningkatan literasi membaca masyarakat” dan “Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB”, dengan 2 sasaran yaitu “Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat” dan “Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib”.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada perangkat daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17,74 Nilai
2.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	35%

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Hasil persentase yang berhasil diraih tidak menyebabkan timbulnya rasa bangga yang berlebihan sehingga merupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan informasi dan pelayanan yang baik pada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang ada tidak menyebabkan menurunnya motivasi namun memberikan ilmu yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP/LAKIP oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB kepada pihak-pihak yang memberikan mandat. Dengan demikian, LKjIP/LAKIP merupakan sarana bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana tingkat pencapaiannya sehubungan dengan mandat yang telah diterimanya.

Dasar Hukum penyusunan LKjIP/LAKIP berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LKjIP/LAKIP merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas dan Responsibilitas terhadap kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB (DPKP NTB) selama Tahun Anggaran 2022.

Selain itu, penyampaian LKjIP/LAKIP dapat pula berfungsi sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan/keputusan untuk keperluan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB (DPKP NTB) serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi. Hal ini senada dengan telah diterbitkannya TAP MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB menyusun dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP) sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yaitu urusan perpustakaan dan kearsipan. Berikut Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB:

- a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Deposit, Pengolahan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Pengelolaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Kearsipan, Perlindungan, Penyelamatan Dan Pelayanan Kearsipan, Pelayanan Perpustakaan Dan Kearsipan serta Kesekretariatan;
- b. Merumuskan bahan norma, standard pedoman dan kriteria (NSPK) perpustakaan dan kearsipan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan pembudayaan gemar membaca;
- d. Merumuskan bahan dan menetapkan kebijakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengumpulan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) serta naskah kuno milik daerah;
- f. Merumuskan bahan kebijakan untuk penerbitan Katalog Induk Daerah (KID);
- g. Merumuskan bahan kebijakan pengumpulan dan pelestarian naskah kuno milik daerah;
- h. Merumuskan bahan kebijakan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- i. Merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan jabatan fungsional pustakawan dan fungsional arsiparis di skala provinsi sesuai kebijakan nasional;
- j. Merumuskan bahan kebijakan teknis penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu pustakawan dan arsiparis;

- k. Merumuskan bahan pelaksanaan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan otomasi perpustakaan dan kearsipan;
- l. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;
- m. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan preservasi, perlindungan dan penyelamatan arsip serta melakukan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Provinsi, dan membuat daftar arsip;
- n. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan kerjasama dan informasi ilmiah perpustakaan dan kearsipan;
- o. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas kegiatan Dinas;
- p. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- q. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Adapun ringkasan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB adalah merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Deposit dan Informasi Perpustakaan, Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis, Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan serta Kesekretariatan.

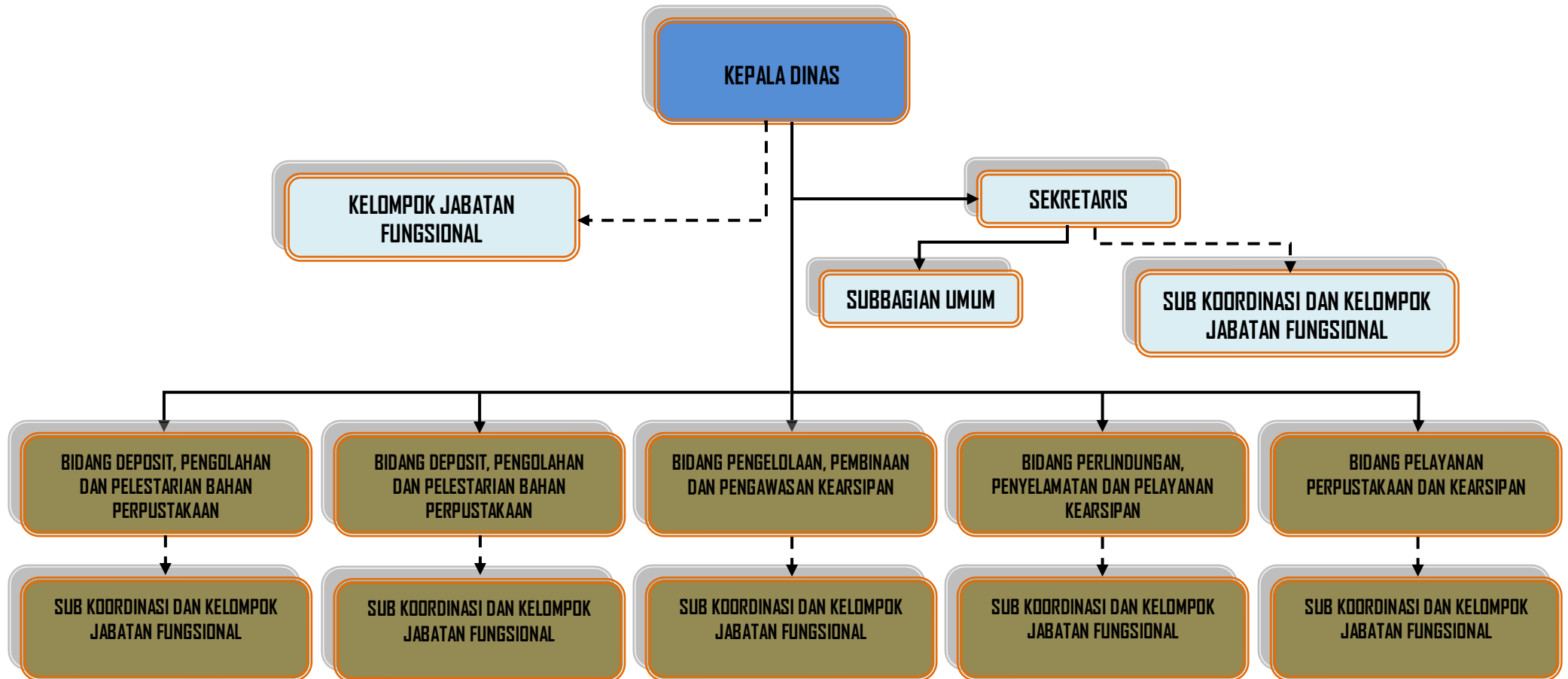
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, dibantu oleh :

1. Sekretariat, Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program, Keuangan dan Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, dan
 - b. Sub Koordinasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, terdiri dari:
 - Sub Koordinasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri dari:
 - Sub Koordinasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, terdiri dari:
 - Sub Koordinasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perlindungan, Penyelamatan dan Pelayanan Kearsipan, terdiri dari:
 - Sub Koordinasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
 - Sub Koordinasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada gambar 1.2.1, sebagai berikut:

**Gambar 1.2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB
(Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2021)**



1.3 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur adalah penggerak utama roda pemerintahan. Jumlah personil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Februari 2022, adalah sebanyak 95 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Aparatur (SDA) ditinjau dari status kepegawaian

Tabel 1.3.1 Data Sumber Daya Aparatur (SDA)

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	ASN	54	41	95
2.	PTT	1	1	2
TOTAL		55	42	97

- b. Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan Kepangkatan

Tabel 1.3.2 Data Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	IV E	0	0	0
2.	IV D	1	0	1
3.	IV C	2	0	2
4.	IV B	5	0	5
5.	IV A	3	4	7
6.	III D	10	5	15
7.	III C	2	3	5
8.	III B	10	5	15
9.	III A	3	7	10
10.	II D	1	1	2
11.	II C	10	14	24
12.	II B	0	2	2
13.	II A	4	0	4
14.	I D	0	0	0
15.	I C	3	0	3
TOTAL		54	41	95

c. Aset yang Dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB

1.3.3 Tabel Aset yang Dikelola Februari 2022

No.	Jenis Asset	Jumlah	Harga
1	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	1.500 m ²	332.750.000
2	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	5.000 m ²	300.600.000
3	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	155 m ²	4.339.500
4	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	2.650 m ²	1.722.500.000
5	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	1.258 m ²	50.240.000
6	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	1.000 m ²	40.000.000
7	Tanah Bangunan dan Gedung Kantor	388 m ²	15.520.000
8	Tanah Bangunan Rumah Dinas	388 m ²	15.520.000
9	Kendaraan Roda 4	17 buah	2.726.564.196
10	Kendaraan Roda 2	31 buah	330.112.501
11	Sepeda Listrik	4 buah	84.000.000

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sebagai salah satu lembaga penyedia, pengelola informasi dan pengembangan kearsipan harus bisa menyediakan informasi yang diperlukan oleh para penggunanya, baik yang tersedia diperpustakaan dan kearsipan secara fisik maupun yang bisa diakses via internet. Berdasarkan hal tersebut, kondisi ideal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB yang diharapkan meliputi:

1. Meningkatnya kompetensi SDM;
2. Tersedianya kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
3. Optimalnya pelaksanaan pembinaan perpustakaan berbasis literasi digital;
4. Tersedianya koleksi digital dan aplikasi penunjang pelayanan koleksi digital;
5. Terselamatkannya arsip daerah.

Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dalam pembangunan daerah adalah meningkatkan pembangunan masyarakat melalui upaya pembinaan perpustakaan di

masyarakat dan sekolah menengah atas, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno daerah, pengelolaan arsip baik dinamis maupun statis serta perlindungan dan penyelamatan arsip secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya pemanfaatan koleksi perpustakaan dan arsip berbasis digital (literasi digital) melalui daring (online).

Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi NTB sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan pemetaan atas kondisi real yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi NTB dalam melakukan pengembangan dan pembinaan bidang perpustakaan dan kearsipan. Dengan memperhatikan dan menganalisis secara mendalam kondisi lingkungan internal dan eksternal yang begitu dinamis, dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan yang menjadi isu sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Sarana dan prasana yang dirasa masih kurang memadai;
2. Pemanfaatan akan teknologi belum maksimal;
3. Kompetensi Sumber daya manusia belum maksimal;
4. Belum optimalnya aplikasi berbasis digital yang dilayankan secara daring (*online*).

1.4.2 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Proses perumusan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi menuju kualitas kondusifitas daerah menuju *democratic governance*. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB melalui pengembangan minat dan budaya baca berbasis literasi digital serta pengolahan dan pelestarian arsip dituntut lebih humanis, antisipatif, responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional yang berdampak pada kondusifitas daerah. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya menata dan mengembangkan perpustakaan dan arsip dalam waktu 5 tahun kedepan, berdasarkan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, sebagai berikut:

- a. Isu strategis Bidang Kearsipan:

- 1) Belum optimalnya sistem administrasi kearsipan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas;
 - 2) Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; dan
 - 3) Belum terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip.
- b. Isu strategis Bidang Perpustakaan:
- 1) Masih kurangnya Sarana Prasarana pendukung peningkatan minat dan daya baca masyarakat, terutama mobil Perpustakaan Keliling untuk menjangkau wilayah wilayah pelosok di Provinsi NTB;
 - 2) Masih kurangnya Koleksi bahan bacaan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada;
 - 3) Belum terwujudnya jumlah dan kapasitas perpustakaan yang memadai, terutama perpustakaan Desa, dimana berdasarkan data dari Kemendes & PDT, dari 1005 Desa/Kelurahan yang ada di NTB, baru 668 Desa yang memiliki Perpustakaan Desa; dan
 - 4) Masih minimnya dukungan untuk Pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

1.5 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB.

1.6 Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menguraikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada sub bab ini diuraikan kesimpulan umum serta capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, visi dan misi dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

1. Visi

Visi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah “***Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang***”. Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :

1. Suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
2. Suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.
3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi membangun NTB Gemilang ditetapkan 6 misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023, sebagai berikut :

1. Misi 1: NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

2. Misi 2: NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
3. Misi 3: NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. Misi 4: NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Misi 5: NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi; dan
6. Misi 6: NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Bila menelaah keenam misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebagai unsur penunjang urusan Pemerintah Daerah, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB masuk ke dalam **Misi 2: NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.**

3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah. Terdapat 2 (dua) Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah adalah 1) Terwujudnya budaya literasi masyarakat dengan indikator tujuan Nilai budaya literasi; 2) Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas, selanjutnya terdapat 2 (dua) Sasaran yaitu 1) Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan 2) Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib.

Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib memiliki indikator sasaran yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib dengan rincian output melakukan pengolahan arsip dinamis (terdiri dari arsip aktif dan inaktif), selanjutnya melakukan pemeliharaan arsip dari aktif ke inaktif/alih media arsip (digitalisasi

arsip). Berdasarkan hal tersebut merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis dan sarana untuk melakukan evaluasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana tertuang pada table 2.1.1.

Tabel 2.1.1
Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sesuai Renstra 2019-2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi 2: NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.	Terwujudnya budaya literasi masyarakat		Nilai budaya literasi	Nilai	63,74	66,88	54,22		
		Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	-	-	13,95	17,74	68
	Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB		Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas	%	n/a	n/a	25	30	35
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	%	n/a	n/a	30	35	40

Dalam upaya mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB menyusun pilihan-pilihan strategis dan sarana untuk melakukan evaluasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana tertuang pada table 2.1.2.

Tabel 2.1.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya budaya literasi masyarakat	Nilai budaya literasi			Nilai	63,74	66,88	54,22		
		Meningkatnya literasi membaca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	-	-	13,95	17,74	68
Terwujudnya Tertib Arsip Dalam Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi NTB	Persentase Perangkat Daerah dan LKD Kab/Kota dengan Nilai Pengawasan Kearsipan B Ke Atas			%	n/a	n/a	25	30	35
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	%	n/a	n/a	30	35	40

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga/instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki 2 (dua) bidang urusan yaitu perpustakaan dan kearsipan sebagai penyedia informasi bagi pemustaka dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui pencapaian dari tujuan dan sasaran strategis. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tabel 2.1.3.

Tabel 2.1.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan Sumber Data, Alasan)
1.	Meningkatnya literasi membaca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Formulasi : Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional RI setiap tahun. Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data : Perpustakaan Nasional R.I. Alasan : Pemanfaatan Perpustakaan untuk Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat di Provinsi NTB
2.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Formulasi : Jumlah Perangkat Daerah yang telah Mengelola Arsip Secara Tertib dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100% Tipe Penghitungan : Kumulatif Sumber Data : - Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Dinamis; dan - Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Statis. Alasan : Untuk mengetahui persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip secara tertib.

Dari pencapaian program/kegiatan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama maka ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2022 dalam Penetapan Kinerja Tahunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.2 Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada perangkat daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17,74 Nilai
2.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	35%

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai urusan wajib non pelayanan dasar bidang perpustakaan dan kearsipan, maka setiap sasaran strategis dan indikator strategis tersebut diatas ditunjang oleh program dan kegiatan. Adapun program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB untuk mencapai sasaran strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1 adalah Meningkatkan Literasi Membaca Masyarakat

Capaian atas target sasaran strategis tersebut berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional R.I., hal tersebut didasarkan pada Indikator Pembentuk Indeks yang terdiri dari 7 komponen unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang termuat di dalam Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Adapun 7 komponen tersebut antara lain: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Anggota Perpustakaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka target capaian sasaran strategis Meningkatkan Literasi Membaca Masyarakat di tahun 2022 adalah 17,74 dengan satuan Nilai dan realisasi nilai indeks 67,42, capaian atas target tersebut bersumber dari data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Perpustakaan Nasional R.I.

b. Sasaran Strategis 2 adalah Meningkatkan Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib

Sasaran strategis ke-2 (dua) yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB di dukung oleh Program Pengelolaan Arsip di tahun 2022. Target capaian kinerja Program Pengelolaan arsip telah tercapai di Tahun 2022 dengan persentase sebesar 37,2%, data atas pencapaian tersebut bersumber dari Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dan Bidang Perlindungan, Penyelamatan dan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang didukung oleh program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian indikator kinerja utama menggambarkan capaian indikator *outcome*. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB merupakan agregat dari capaian kinerja pada bidang-bidang. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek program, sasaran, kegiatan dan indikator yang termuat dalam Renstra dan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Capaian kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Secara umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB 2019-2023.

Capaian target dan realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022 dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Secara garis besar semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Adapun capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	17,74 Nilai	67,42 Nilai
2.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	35%	37,20%

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 telah mencapai target.

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Pada indikator kinerja ini, di tahun 2022 target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB adalah 17,74 Nilai, dan realisasi Nilai Indeks 67,42 data dirilis dari Perpustakaan Nasional R.I. Tahun 2022.

2. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib

Pada indikator kinerja ini, target Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib melalui Program Pengelolaan Arsip sebesar 35% dengan realisasi sebesar 37,20% atau jumlah arsip yang telah diolah sebesar 70.255 berkas sampai dengan tahun 2022.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022 dan target beberapa tahun terakhir pada tabel 3.1.2 :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	2019			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	2020			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	2021			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	2022		
			Target	Realisasi	Capaian				Target	Realisasi	Capaian				Target	Realisasi	Capaian				Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pengolahan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Persentase Dokumen Arsip Daerah yang Dikelola	%	17,47	17,47	17,47	Terwujudnya Pengolahan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Persentase Pengolahan dan Pelestarian Dokumen Terselamatkan	%	104	104	104	Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13,95	17,66	126,59	Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	17,74	67,42	363,86
Terselenggaranya Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Persentase Pengembangan Minat dan Budaya Baca	%	18,94	18,94	18,94	Terwujudnya Digitalisasi Bahan Pustaka	Persentase Bahan Pustaka Berbasis Digital	%	100	100	100	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	%	30	33	110	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	%	35	37,20	106,28
Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka dan Karya Cetak dan Karya Rekam	Persentase Bahan Pustaka dan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Dikelola	%	20	20	20																		
Terselenggaranya Digitalisasi Bahan Pustaka/Alih Media Koleksi Perpustakaan	Persentase Bahan Pustaka/Alih Media Koleksi Perpustakaan yang Digitalisasi	%	20	20	20																		

Tingkat Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Satuan dan Target yang disebabkan oleh perubahan pada dasar hukum yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan di Tahun 2019-2020 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

dan juga perubahan/ revisi Renstra di Tahun 2021-2022. Namun pada dasarnya perubahan tersebut tidak merubah arah tujuan pembangunan daerah Provinsi NTB baik Visi, Misi Kepala Daerah dan Misi 2 yang ingin dicapai Perangkat Daerah.

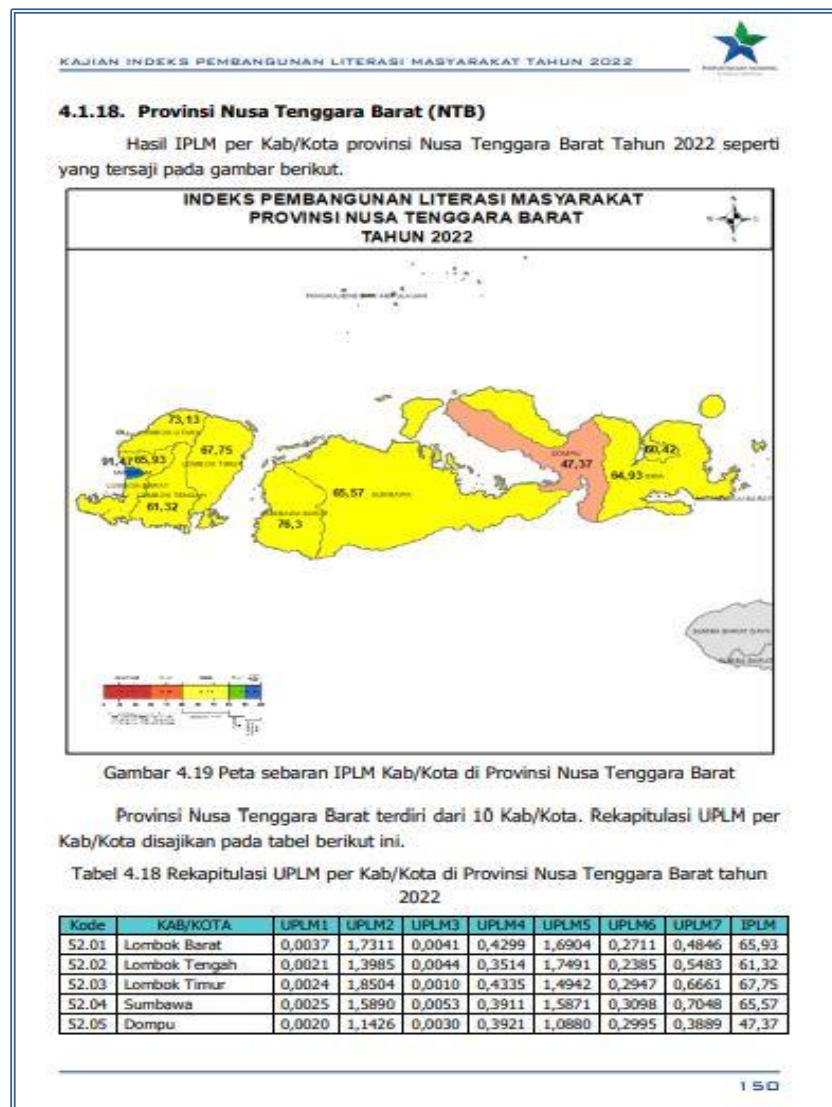
Pelaksanaan kinerja yang telah di capai di Tahun 2019 pada indikator kinerja, antara lain: 1) Persentase Dokumen Arsip Daerah yang Dikelola telah mencapai target 17,47%; 2) Persentase Pengembangan Minat dan Budaya Baca telah mencapai target 18,94%; 3) Persentase Bahan Pustaka dan Karya Cetak dan Karya Rekam yang Dikelola telah mencapai target sebesar 20%; dan 4) Persentase Bahan Pustaka/ Alih Media Koleksi Perpustakaan yang Digitalisasi telah mencapai target sebesar 20%.

Capaian realisasi kinerja pada Indikator Kinerja di Tahun 2020: 1) Persentase Pengolahan Arsip yang Terselamatkan telah mencapai target 104%, dan 2) Persentase pemanfaatan layanan digital dengan realisasi telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%.

Selanjutnya Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja di Tahun 2021 pada indikator: 1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah mencapai target 13,95 dengan satuan Nilai, hasil dari data realisasi nilai indeks tersebut adalah 17,66 data rilis dari Perpustakaan Nasional R.I., dan indikator 2) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib dengan target 66,67% dan telah terealisasi sebesar 67,42% arsip daerah yang telah diolah atau sebesar 55.580 berkas.

Pelaksanaan capaian kinerja indikator sasaran strategis di tahun 2022: 1) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian kinerja indeks 67,42 dari target yang telah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional R.I. sebesar 17,74. Selanjutnya pencapaian tersebut bersumber dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022 Perpustakaan Nasional R.I., sebagaimana tertera pada Gambar 3.2.1. Selanjutnya Indikator sasaran strategis ke-2 (dua) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB di dukung oleh Program Pengelolaan Arsip di tahun 2022. Target capaian kinerja Program Pengelolaan arsip telah tercapai dengan arsip yang telah diolah dan terselamatkan sebesar 70.255 arsip di Tahun 2022 dengan persentase sebesar 37,2%, data atas pencapaian tersebut bersumber dari Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dan Bidang Perlindungan, Penyelamatan dan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022.

**Gambar 3.2.1 Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022 Perpustakaan Nasional R.I.
Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022**



KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT TAHUN 2022

Kode	KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM
52.06	Bima	0,0025	1,6265	0,0037	0,4061	1,5474	0,2856	0,6730	64,93
52.07	Sumbawa Barat	0,0036	2,3592	0,0048	0,4500	1,4428	0,3132	0,7678	76,30
52.08	Lombok Utara	0,0035	1,8632	0,0065	0,4366	1,2502	0,3823	1,1767	73,13
52.71	Kota Mataram	0,0025	2,3507	0,0010	0,4649	2,0322	0,3823	1,1695	91,47
52.72	Kota Bima	0,0025	1,2782	0,0085	0,4333	1,4467	0,3111	0,7494	60,42
	Nusa Tenggara Barat	0,0027	1,7189	0,0042	0,4189	1,5328	0,3088	0,7329	67,42

Pencapaian nilai IPLM Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar **67,42** dan masuk ke dalam **kategori Sedang**. Nilai IPLM tertinggi dicapai Kota Mataram dengan nilai 91,47, sedangkan nilai terendah oleh Kab. Dompu dengan nilai 47,37.

INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		Nilai
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,0027
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	1,7189
3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,0042
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	0,4189
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	1,5328
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	0,3088
7	Jumlah Pemustaka (UPLM7)	0,7329

Jumlah Penduduk (BPS 2020)	
5.125.622	

Jumlah Penduduk Usia Sekolah (Kemendikbud dan BPS 2022)	
1.023.228	

Jumlah Penduduk Usia Perguruan Tinggi (BPS 2022)	
138.957	

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
1	Rasio Ketersediaan Perpustakaan		
	a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum	0,0001	Terdapat 14 perpustakaan per 100.000 penduduk
	b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	0,0012	Terdapat 120 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah
	c. Rasio ketersediaan perpustakaan Perguruan tinggi	0,0013	Terdapat 129 perpustakaan per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi
2	Persentase Perpustakaan Dipersepsi ber-SNP	29,26%	Terdapat 29,26% perpustakaan yang dipersepsi memenuhi standar nasional perpustakaan
3	Rasio Keterukupan Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	0,0531	Belum Memenuhi
4	Kekurangan Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO	9.706.614	Kekurangan koleksi di PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT sebanyak 9706614
5	Rasio Keterukupan koleksi berdasarkan target Renstra	1 : 9	1 judul koleksi dapat diakses oleh 9 penduduk
6	Rasio Keterukupan Tenaga Perpustakaan	1 : 17317	1 tenaga perpustakaan melayani 17317 penduduk

151



7	Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan	:	1,68%	Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi per jumlah penduduk sebanyak 1,68%, belum ideal.
8	Tingkat Keaktifan Kegiatan Sosialisasi & Pemanfaatan Perpustakaan	:	0,88%	Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemanfaatan perpustakaan sebanyak 0,88%
9	Tingkat <i>Engagement</i> Anggota Perpustakaan	:	2,67%	Terdapat 2,67% penduduk yang merupakan anggota perpustakaan

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Realisasi kinerja Tahun 2022 adalah pelaksanaan kinerja tahun pertama dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sudah sesuai dengan dokumen yang tertera pada Revisi Rencana Strategis, berikut perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah:

Tabel 3.1.3
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra 2019-2023
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	2018		Target Jangka Menengah Renstra 2019-2023									
					2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	13,89	13,89	13,95	17,66	17,74	67,42	65	-
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Arsip Daerah yang Terpelihara	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	33	35	37,2	40	-

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada dokumen Rencana Strategis 2019-2023 memiliki target Nilai sebesar 17,74, realisasi nilai indeks pada tahun 2022 sebesar 67,42 data rilis dari Perpustakaan Nasional R.I.. Ketersediaan data tersebut bersumber dari Perpustakaan Nasional R.I., hal tersebut didasarkan pada Indikator Pembentuk Indeks yang terdiri dari 7 komponen unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), 7 komponen unsur tersebut telah sesuai atau terpenuhi di dalam Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Adapun 7 komponen tersebut antara lain: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Anggota Perpustakaan. Keberhasilan atas pencapaian realisasi di tahun 2022 didukung oleh 2 Program, antara lain:
 1. Program Pembinaan Perpustakaan
 2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- b. Pencapaian Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib pada target tahun terakhir 2022 dalam dokumen rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB 2019-2023 memiliki target 35%, realisasi pada tahun 2022 sebesar 37,2%. Pencapaian atas realisasi indikator kinerja Persentase Arsip Daerah yang Terpelihara di dukung oleh Program Pengelolaan Arsip. Selanjutnya pengolahan arsip dinamis provinsi terdiri dari 2 pelaksanaan, yaitu pengolahan arsip dinamis aktif, merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan /atau terus menerus. Sementara itu pengolahan arsip dinamis inaktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Berdasarkan hal tersebut, adapun realisasi yang telah tercapai di tahun 2022 sebesar 70.255 arsip.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Standar nasional realisasi kinerja untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB belum ada, maka belum dapat dilakukan proses pembandingannya.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pada perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dilakukan pengukuran melalui evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja. Pada Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB telah melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 guna mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Adapun penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat.	2022	
				Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	17,74	67,42
2.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	%	35	37,2

Keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB untuk kinerja tahun 2022 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Keberhasilan tersebut berdasarkan data, hasil analisis dan evaluasi Program Strategis.

1. Sasaran strategis ke-1 (satu), Meningkatkan Literasi Membaca Masyarakat:

- Indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB, pada tahun 2022 target nilai indeks yang ingin dicapai 17,74 dengan realisasi nilai indeks 67,42 data rilis dari Perpustakaan Nasional R.I. Faktor/penyebab keberhasilan atas indikator kinerja:

- Adanya Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Anggota Perpustakaan;
 - Adanya kerjasama antara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provsinsi dengan Kepala Dinas di Kab./Kota guna mendukung Indikator Pembentuk Indeks yang terdiri dari 7 komponen unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), sebagaimana tercantum pada Gambar 3.2.1;
 - Adanya kesamaan gerak langkah antara Kepala Dinas dengan Bidang dalam pelaksanaan program kegiatan;
 - Adanya inovasi-inovasi yang tertuang di dalam Program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain: 1) Café Literasi Keliling; dan 2) NTBelib dan iDeposit
 - Sistem pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan mempergunakan sistem yang berbasis komputer yang dapat membantu produktivitas dan efisiensi.
2. Sasaran strategis ke-2 (dua), Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib:
- Dengan indikator kinerja Persentase Persentase Arsip Daerah yang Terpelihara, di tahun 2022 target yang ingin dicapai sebesar 35% dengan realisasi 37,20%. Faktor/penyebab keberhasilan atas indikator kinerja, sebagai berikut:
 - Kemampuan sumber daya aparatur yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan arsip daerah;
 - Ketersediaan sarana dan prasarana terkait pengolahan arsip daerah yang cukup memadai;
 - Adanya dukungan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pelstarian arsip daerah baik di swasta/perangkat daerah;
 - Adanya kesamaan gerak langkah antara Kepala Dinas dengan Bidang dalam pelaksanaan program kegiatan pengolahan arsip; dan
 - Sistem pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan mempergunakan sistem yang berbasis komputer yang dapat membantu produktivitas dan efisiensi.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2022 pada tabel 3.1.6.

Tabel 3.1.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %
1.	Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	67,42	99,62
2.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	37,20	99,66

Berdasarkan tabel 3.1.6, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator dengan nilai rata-rata 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran Tahun 2022. Berikut adalah tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dengan kegiatan dan sub kegiatan pendukung Sasaran Strategis, tabel 3.1.6.1.

Tabel. 3.1.6.1
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
I	Sasaran Strategis I : Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat								
	Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	75 Perpustakaan	75 Perpustakaan	100%	236.533.650,00	235.289.850,00	99,47		1.243.800,00
	Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	75.000 Orang	75.000 Orang	100%	75.301.300	74.599.800,00	99,07		701.500,00
	Kegiatan: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%	15.767.690.200,00	15.707.392.700,00	99,62		60.297.500,00
	Sub Kegiatan: Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	12 Perpustakaan	12 Perpustakaan	100%	28.142.500,00	28.142.500,00	100		0,00
	Kegiatan: Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	10 Eksemplar	10 Eksemplar	100%	54.110.300,00	51.670.800,00	95,49		2.439.500
	Sub Kegiatan: Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10 Eksemplar	10 Eksemplar	100%	41.320.400	38.881.900	94,10		2.438.500

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Relevansi dengan sasaran kinerja	Efisiensi
II	Sasaran Strategis II : Meningkatkan Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib Indikator Kinerja : Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib								
	Kegiatan: Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	20.000 Berkas	20.000 Berkas	100%	69.006.500,00	68.665.500,00	99,51		341.000,00
	Sub Kegiatan: Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	10.000 Berkas	10.000 Berkas	100%	4.867.500,00	4.867.500,00	100		0,00
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	10.000 Berkas	10.000 Berkas	100%	64.139.000,00	63.798.000,00	99,47		341.000,00
	Kegiatan: Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	5.000 Arsip	5.000 Arsip	100%	2.552.000,00	2.518.000,00	98,67		34.000,00
	Sub Kegiatan: Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5.000 Arsip	5.000 Arsip	100%	2.552.000,00	2.518.000,00	98,67		34.000,00

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dalam melaksanakan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tahun 2022, yang tercakup dalam 3 program yaitu :

1. Program Pembinaan Perpustakaan;
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno; dan
3. Program Pengelolaan Arsip

Faktor keberhasilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Dalam mencapai realisasi kinerja, yaitu : 1) Ketepatan waktu dan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan; 2) Konsistensi dalam penerapan/pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 3) Adanya kerjasama yang terarah, terukur dan inovatif sehingga menciptakan inovasi-inovasi di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari Café Literasi Keliling, NTBelib dan iDeposit; dan 4) Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022.

Berikut adalah analisis program, kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022, tertuang pada tabel 3.1.7.

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator Program	Sat.	Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2022	
					Target	Realisasi
Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			Nilai	17,74	67,42
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	100
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib			%	35	37,20
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis	%	100	100

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran atas capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penyerapan Anggaran		
			Realisasi Keuangan		Fisik (%)
			Rp.	(%)	
Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	16.004.223.850	15.942.682.550	99,62	100
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	63.807.000	60.587.500	94,95	100
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib	Program Pengelolaan Arsip	125.778.600	125.350.800	99,66	100

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 sebesar Rp. 28.904.318.919,00 atau dengan nilai persentase sebesar 96,02%, dengan rincian realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 13.307.778.919,00 atau persentase sebesar 98,94% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 15.596.540.000,00 dengan persentase sebesar 99,9%. Anggaran dan realisasi belanja Operasional dan belanja Modal tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.2.2:

Tabel 3.2.2
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

Kode Rekening	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp.)
			Anggaran	%	Fisik (%)	
5	BELANJA	30.101.331.339	28.904.318.919	96,02	99,83	1.197.012.420
5.1	BELANJA OPERASIONAL	14.489.634.339	13.307.778.919	91,84	98,94	1.181.855.420
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	12.122.964.389	11.104.617.007	91,60	100	1.018.347.382
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.366.669.950	2.203.161.912	93,09	97,88	163.508.038
5.1.05	BELANJA HIBAH	-	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	15.611.697.000	15.596.540.000	99,9	100	15.157.000

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 dimaksudkan untuk mengimplementasikan visi, misi dan agenda kerja Kepala Daerah yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan kepada pemustaka di tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan kemudahan bagi pemustaka melalui koleksi digital pada aplikasi NTBelib dan iDeposit serta layanan keliling café literasi serta layanan internet gratis. Berdasarkan hal tersebut sasaran strategis 1 Meningkatnya Literasi Membaca Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB tahun 2022 dengan target nilai 17,74 dan realisasi nilai indeks 67,42, data realisasi tersebut di rilis oleh Perpustakaan Nasional R.I. Adapun data dukung bersumber dari Perpustakaan Nasional R.I. yang didasarkan pada Indikator Pembentuk Indeks yang terdiri dari 7 komponen unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang termuat di dalam Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Adapun 7 komponen tersebut antara lain: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial dan Anggota Perpustakaan.

Pada sasaran strategis 2 Meningkatnya Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah yang Tertib dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2022 telah tercapai sebesar 37,20% dari target 35%. Pencapaian atas realisasi indikator kinerja Persentase Arsip Daerah yang Terpelihara di dukung oleh Program Pengelolaan Arsip. Selanjutnya pengolahan arsip dinamis terdiri dari 2 pelaksanaan, yaitu pengolahan arsip dinamis aktif, merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan /atau terus menerus. Sementara itu pengolahan arsip dinamis inaktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Berdasarkan hal tersebut, adapun realisasi yang telah tercapai di tahun 2022 sebesar 70.255 arsip.

4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, maka perlu dilakukannya upaya atau langkah-langkah ke depan dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah, yaitu:

1. Memberikan kebijakan dan koordinasi di bidang perpustakaan dan kearsipan guna mendukung kinerja perangkat daerah;
2. Menyelenggarakan kerjasama dan informasi ilmiah perpustakaan dan kearsipan;
3. Membuat laporan kinerja yang baik; dan
4. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap capaian kinerja di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan juga dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2022, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator kinerja yang telah ada sesuai perkembangan tuntutan yang ada, sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan tetap mengedepankan pelayanan yang profesional.